

## ABSTRAK

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan aspek hukum negara, ajaran agama, serta dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam mengomunikasikan hukum perkawinan bagi calon pengantin beda agama dengan menggunakan teori dialogis Martin Buber. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi hukum perkawinan dilaksanakan melalui dua aspek, yaitu aspek *I-Thou* yang bersifat dialogis, empatik, dan manusiawi, serta aspek *I-It* yang menekankan fungsi administratif dan normatif sesuai ketentuan hukum. Keseimbangan kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa komunikasi hukum perkawinan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pemahaman dan penerimaan calon pengantin terhadap realitas hukum yang dihadapi.

Kata kunci: Kementerian Agama, komunikasi hukum, perkawinan beda agama, teori dialogis.

## **ABSTRACT**

*Interfaith marriage in Indonesia is a complex issue because it involves state legal regulations, religious doctrines, and social dynamics. This study aims to analyze the role of the Ministry of Religious Affairs of Purbalingga Regency in communicating the marriage law to prospective interfaith couples using Martin Buber's dialogical theory. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the communication of marriage law is carried out through two main aspects, namely the I–Thou aspect, which emphasizes dialogical, empathetic, and humane communication, and the I–It aspect, which focuses on administrative and normative functions in accordance with legal provisions. The balance between these two aspects demonstrates that the communication of marriage law is not solely oriented toward legal certainty, but also toward fostering understanding and acceptance among prospective couples regarding the legal realities they face.*

*Keywords: Ministry of Religious Affairs, legal communication, interfaith marriage, dialogical theory.*

